

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-buku

- Abdurrahman, 1983, *Masalah Pencabutan Hak Atas Tanah dan Pembebasan Tanah di Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Adjie, Habib, 2008, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 2009, *Sekilas Dunia Notaris dan PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan)*, CV.Mandar Maju, Bandung.
- Anshori, Abdul Ghofur, 2013, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, Cetakan Kedua, UII Press, Yogyakarta.
- Arkunto, Suharsimi, 2006, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Cetakan ke-13, PT.Asdi Mahasatya, Jakarta.
- Ashshofa, Burhan, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, PT.Rineka Cipta, Jakarta.
- Bertens, K, 1997, *Etika*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Fuady, Munir, 1999, *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktik* , Buku Kedua, Citra Aditya Abadi, Bandung, hal.205-206.
- Harahap, Yahya, 2008, *Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika*, Cetakan ke-8, Jakarta.
- Hutangalung, Arie S, 2005, *Tebaran Pemikiran Seputar Masalah Hukum Tanah*, Jakarta : Lembaga Pemberdayaan Hukum Indoneisa, hlm.19.
- Limbong, Bernard, 2015, *Pengadaan Tanah untuk Pembangunan*, Pustaka Margaretha, Jakarta.
- Madalis, 1995, *Metode Penelitian : Suatu Pendekatan Proposal*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Nazir, Moh, 2003, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Rubaie, Ahmad, 2007, *Hukum Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum*, Bayumedia, Malang.

- Salindeho, 1993, *Masalah Tanah dalam Pembangunan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sarkawi, 2014, *Hukum Pembebasan Hak Milik Adat untuk Pembangunan Kepentingan Umum*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1998, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pres, Jakarta.
- Subekti, 1987, *Hukum Pembuktian*, Pradya Paramita, Jakarta.
- Sumardjono, Maria SW, 2008, *Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya*, PT.Kompas Media Nusantara, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2014, *Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_, 2015, *Dinamika Pengaturan Pengadaan Tanah di Indonesia*, Gama Press, Yogyakarta.
- Sugiyono, 2005, *Metode Penelitian Bisnis*, Alfabeta, Bandung.
- Susanto, Herry, 2010, *Peran Notaris Dalam Menciptakan Keputusan Dalam Kontrak*, FH.UII Press, Yogyakarta.
- Syah, Hidayat, 2010, *Pengantar Umum Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan Verivikatif*, Suska Press, Pekanbaru.
- Tedjosaputro, Liliana, 2003, *Etika Profesi dan Profesi Hukum*, Aneka Ilmu, Semarang.
- Tobing, L, GHS, 1983, *Peraturan Jabatan Notaris*, Cetakan ketiga, Erlangga, Jakarta

### **Peraturan Perundang-undangan**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Lembaran Negara Nomor 75 Tahun 1959.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Staatsblad Nomor 23, Lembaran Negara Nomor 23 Tahun 1948.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960, tentang Peraturan Pokok-pokok Agraria, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 1960, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2034.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Prp. Tahun 1960, tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya, Lembaran Negara Nomor 170 Tahun 1960.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1961, tentang Pencabutan Hak Atas Tanah dan Benda-benda yang Ada di Atasnya, Lembaran Negara Nomor 288 Tahun 1961, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2324.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2003, tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 149 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2012, tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2012.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 tentang Penguasaan Tanah-tanah Negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Presiden Nomor 36 tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Kepala Badan pertanahan Nomor 3 tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

### **Disertasi**

Lukmana, Marcus, “Eksistensi Peraturan Kebijakan dalam Bidang Perencanaan dan Pelaksanaan Rencana Pembangunan di Daerah Serta Dampaknya Terhadap Pembangunan Materi Hukum Tertulis di Indonesia”, *Disertasi*, Universitas Padjajaran, 1996.

### **Tesis**

Esaie, Vatrean, “Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat dalam Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum (Studi di Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah)”, *Tesis*, Magister Kenotariatan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2014.

Puspasari, Arum, “Mekanisme Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum”, *Tesis*, Magister Kenotariatan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2014.

Sucipto, Nurlayla, “Keterkaitan Notaris dan PPAT dalam Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Proyek Jalan Lintas Selatan-Selatan di Kabupaten Cilacap”, *Tesis*, Magister Kenotariatan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2008.

Suprijanto, Agus, “Tinjauan Hukum Nilai Ganti Rugi dalam Rangka Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012”, *Tesis*, Magister Kenotariatan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2014.

Wardani, Kusuma Ayu, “Status Hak Atas Tanah dan Pemberian Ganti Rugi dalam Rangka Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Bawen-Salatiga (Studi Kasus di Kota Salatiga)”, *Tesis*, Magister Kenotariatan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2014.

## Makalah

Fahmi, Idris Aly, Suhariningsih dan Ario Hardickto, 2010, *“Degradasi Kekuatan Pembuktian dan Pembatalan Akta Notaris Menurut Pasal 84 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Makalah, Universitas Brawijaya, Malang.

## Internet

*“Akta Pengakuan Hutang”*, <https://legalbanking.wordpress.com>, diakses tanggal 23 Juni 2016.

Habib Adjie, *“Menilai Pembuktian Akta Otentik”*, [habibadjie.dosen.narotama.ac.id](http://habibadjie.dosen.narotama.ac.id)  
*“Kabupaten Sekadau”*, [http://id.wikipedia.org/wiki/kabupaten\\_sekadau](http://id.wikipedia.org/wiki/kabupaten_sekadau), diakses tanggal 30 Mei 2016.

*“Nama dan Alamat Notaris seKalimantan Barat”*,  
<http://kalbar.kemenkumham.go.id>, diakses tanggal 18 Mei 2016.

*“Pengertian Perladangan”*, <http://pengertian-definisi.blogspot.co.id>, diakses tanggal 24 Juni 2016.

Irma Devita Purnamsari, *“Pengajuan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah ke Kantor Pertanahan”*, <http://www.hukumonline>, diakses tanggal 20 Mei 2016.

*“Profil Kabupaten Sekadau, Letak dan Luas Wilayah”*,  
<http://humassekadau.blogspot.co.id>, diakses tanggal 30 Mei 2016.